

# **REINVENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Syamsu Nujum<sup>1</sup>, Muhammad Nusran<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, <sup>2</sup>Jurusan Teknik Industri  
Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia

Corresponding Author: [muhammad.nusran@umi.ac.id](mailto:muhammad.nusran@umi.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Selama lebih dari satu dekade ini terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional, krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadi salah satu alasan penting terjadinya perubahan Ekonomi tersebut. Pemerintah telah berbuat semampunya untuk menghadapi krisis ekonomi itu. Salah satunya dengan mendesain kebijakan ekonomi, terlepas dari keberhasilan beberapa aspek tertentu, namun repormasi ekonomi itu masih meninggalkan tumpukkan masalah, salah satu yang menjadi sumber persoalan adalah pertumbuhan, ketimpangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan,

Tujuan utama dari usaha pembangunan Ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran, kesempatan kerja bagi penduduk, atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ( Todaro, 1994).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan pembangunan ekonomi dalam wilayah tersebut. tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat

dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata, kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang lambat, daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi. Perbankan dan juga tenaga kerja terampil, disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut pandangan para ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonomi Neo klasik (Robert Solow dan Trevor Swan) pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stock barang modal, luas tanah dan kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2014), suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Sejak dekade 1980-an dinamika perekonomian dunia memang berjalan dengan cepat, hal itu bukan hanya terjadi dinegara maju, tetapi juga dinegara-negara berkembang. Diwilayah Asia Tenggara, misalnya dengan mengambil data sebelum krisis 1997/1998 output ekonomi berhasil mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand dan

Vietnam rata-rata selalu diatas lima persen setiap tahunnya, sebaliknya yang lebih menggembarakan tingkat inflasi berhasil ditekan kurang dari dua digit, yang sekaligus menunjukkan adanya stabilitas harga dikawasan tersebut. Dengan inflasi yang stabil membuat investor memiliki kepastian usaha, sementara konsumen (masyarakat) daya belinya cukup kuat, Pertemuan antara ekspektasi positif dan pemilik modal dan daya beli masyarakat inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara pada kurun waktu tersebut.

Namun secara mendadak pada pertengahan 1997 krisis ekonomi menyerang wilayah Asia dan terus merambat ke Negara-negara lainnya (Stiglitz,2004 , 5) Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh jatuhnya nilai tukar tanpa dapat diisolasi menjalar secara cepat ke Malaysia, Indonesia, Korea, dan lain-lain. Tercatat harga saham Indonesia anjlok 60 persen dan mata uangnya terdevaluasi sangat parah sebesar 600 persen. Sedangkan dikorea Selatan harga saham turun 65 persen dan mata uangnya terdevaluasi sebesar 100 persen.

Di Usianya yang ke 76 tahun, Indonesia hingga kini masih menghadapi kondisi paradoksial .Secara makro ekonomi, Kinerja Indonesia tergolong baik ditengah-tengah penurunan laju pertumbuhan ekonomi global, yang dipicu oleh krisis keuangan dan ekonomi Amerika Serikat pada awal 2008. Indonesia termasuk sedikit Negara di dunia yang perekonomiannya tetap tumbuh positif. Dapat dilihat bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh positif secara konsisten ditengah pemulihan ekonomi global,antara lain

Pertama Trend pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 = 4,9 %. Tahun 2016 =5,02 %. Tahun 2017 = 5,07% Pada Tahun 2018 = 5,27 %. Dan Tahun 2021 = 7,07 %

Kedua, Inflasi terkendali sesuai target Tahun 2015 =2,88 %. Tahun 2016 = 3,61%. Tahun 2017 = 3,02 .Tahun 2018 3,35 %. Tahun 2019 = 3,09 %, Tahun2020 =1,68 % dan Pada Tahun 2021 = 1,46 Rata-rata inflasi antara tahun 2015-2021 adalah 3,18 Persen.

Ketiga, Pada Tahun 2018 Indonesia dinilai oleh lembaga pemeringkat dunia sebagai Negara yang layak investasi.

Saat ini PDB ( Produk domestic bruto) Indonesia pada tahun 2021 triwulan II mencapai Rp. 4.175,8 Trilyun. Jumlah kelas menengah ( middle class income group ) mencapai 45 juta orang. Pada Tahun 2030 jumlah kelas menengah itu akan bertambah 95 juta orang. Dan Ekonomi Indonesia diprediksi akan menempati posisi ketujuh terbesar di dunia, mengungguli Jerman dan Inggris pada saat itu Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu jasa, pertanian, kelautan dan perikanan dan sumberdaya lainnya.

Harus diakui telah banyak kemajuan ekonomi yang dicapai berkat kebijakan reformasi ekonomi yang didesain selama satu decade terakhir. Keberhasilan paling mencolok adalah pencapaian stabilitas makroekonomi , meskipun pada tahun 2008 terjadi megakrisis Finansial dengan episentrum di Amerika Serikat akibat kasus subprime mortgage ( Stiglitz, 2010.2) Krisis ini juga menikam perekonomian Indonesia cukup dalam, seperti turun nya ekspor, goyahnya sektor keuangan/ Perbankan, dan perlambatan kegiatan ekonomi domestic. Namun terlepas dari peristiwa itu , stabilitas makro ekonomi relative terjaga.

## **MASALAH KEMISKINAN**

Di balik gemilangnya prestasi makro ekonomi, kegembiraan bersanding dengan kenyataan yang sangat memprihatinkan kehidupan keseharian mayoritas rakyat miskin didaerah oleh keragaman penderitaan. Jumlah penduduk hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 27,54 juta orang atau 9,41 persen dari total penduduk . Akibat Corona, jumlah penduduk Miskin mencapai 37,9 juta orang Bila mengacu pada garis kemiskinan versi bank dunia yakni, 1,9 dollar AS/orang/hari ( sekitar Rp 855.000/orang/bulan).

(Sharp,et,al 1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi

Pertama,. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

Kedua,. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi.

Ketiga,. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of proverty) Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, pendapatan rendah berinflikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, menyatakan . A poor country is poor because it is poor ( Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang telah ada sejak dahulu, dan semua Negara tidak terkecuali Negara-nagara maju mengalami hal tersebut. Di kebanyakan Negara saat ini ada indikasi gejala kemiskinan semakin memburuk.

Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang berdpmpak Covid-19, Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (1,62 juta orang).Bukan angkatan kerja karena

covid-19 (0,65 juta orang), Sementara tidak bekerja karena covid-19 (1,11 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (15,72 juta orang)

Dalam pada itu jumlah pengangguran terbuka masih begitu besar yakni 6,82 juta orang ( Februari 2019). Hal ini ditenggarai sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang sangat liberal dalam perdagangan bangsa-bangsa lain di dunia , terutama sejak diberlakukannya perdagangan bebas dengan china.

Bukan hanya semakin membludaknya jumlah pengangguran, kian terpuruknya industry ( Produksi) nasional akibat liberalisasi perdagangan pun telah menyebabkan surplus perdagangan Indonesia semakin terpuruk. Bahkan nilai ekspor Indonesia ke China lebih kecil dibanding impornya dari negeri tirai Bambu itu, sebagiann besar ekspor Indonesia hingga kini masih didominasi oleh komoditas primer/ bahan mentah .( Seperti gas alam, minyak sawit, batu bara, bahan tambang lain, rumput laut dan ikan). Yang kecil sekali nilai tambahnya dan kurang menghasilkan multiplier effects ( efek pengganda) bagi ekonomi nasional.

Bila daya saing ekonomi tetap rendah dan impor dibuka selebar-lebarnya seperti ini terus dibiarkan, maka Indonesia tak akan mampu menjadi bangsa produsen, sebaliknya kita akan menjadi bangsa konsumen terbesar yang sangat tergantung pada bangsa-bangsa lain. Yang lebih mencemaskan sektor-sektor ekonomi strategis seperti Pertambangan, perkebunan, perbankan dan telekomunikasi pun sahamnya sebagian besar dimiliki oleh korporasi asing.

Daya saing ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 turun lima peringkat dari 45 ke 50 dari 141 negara yang disurvei. Hal ini tergambar dari turun nya skor indeks daya saing global sebesar 0,3 point menjadi 64,6 point. Sekedar perbandingan Singapura adalah Negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara dan dunia dengan skor 84,8 dan Malaysia di posisi ke 2 dengan skor 74,6 %

## **KETIMPANGAN**

Kesenjangan kelompok kaya dan Miskin semakin Lebar, Menurut Bank dunia , bahwa dengan adanya perlambatan laju pengentasan kemiskinan, serta pesatnya peningkatan kekayaan membuat kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin di Indonesia semakin melebar. Beberapa hal yang cukup menghawatirkan

Pertama. Karena peningkatan ketimpangan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang tidak baik, dan karenanya membatasi pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan yang tengah berlangsung

Kedua, meningkatkan keprihatinan akan kesetaraan, karena seluruh penduduk Indonesia seharusnya memiliki akses terhadap kesempatan yang sama.

Ketiga , Peningkatan ketimpangan dapat membawa resiko bagi pertumbuhan ekonomi dan social pada masa depan.

Menurut Suhyanto (2005) Disparitas antar wilayah berarti perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Perbedaan antar wilayah ini dapat terletak pada perkembangan sektor pertanian, perkembangan infra struktur, pendidikan, pelayanan, kesehatan, fasilitas perumahan dan sebagainya.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian pulau jawa dan luar pulau jawa, melainkan juga kawasan barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrument untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan dimasa mendatang. Strategi alokasi

anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ ketimpangan ( Mujidi, 1997).

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi satu daerah. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III- 2019 tumbuh 5,04 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,49 %. Struktur Ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia, Angka ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi, Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,01 persen, Kawasan Barat Indonesia 10,33 persen, dan perkotaan 7,02 persen sementara ketimpangan pendapatan perdesaan 0,324 dan perkotaan 0,4. Jika ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sangat tajam ini tidak segera dikoreksi maka bukan hanya urbanisasi dengan segudang permasalahan dan juga bias mengakibatkan inefisiensi ( rendahnya daya saing) Perekonomian nasional dan munculnya gerakan separatisme.

Angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta kesenjangan kaya dan miskin telah mengakibatkan tekanan hidup yang sangat berat bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, sehingga membuat mereka banyak yang menderita kecemburuan social, kondisi sosio-antropologis semacam inilah yang mengakibatkan kian marak perampokan, perkelahian dan beragam penyakit social lainnya.

Dari seluruh permasalahan social ekonomi diatas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dari tahun ke tahun sebenarnya IPM Indonesia mengalami peningkatan namun peningkatan yang terjadi belum membawa



Indonesia pada level menengah. UNDP mencatat, IPM Indonesia berada pada tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir, namun disaat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.

Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20.000 per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk.

Kedua, Tingkat kesehatan dan kematian tercatat sebanyak dua juta anak dibawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per seratus ribu kelahiran hidup.

Fakta bahwa Indonesia sampai sekarang masih sebagai Negara berkembang dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing ekonomi yang rendah merupakan sebuah ironi yang memilukan. Betapa tidak, Indoneia dikauniai Allah SWT modal dasar (potensi) yang lengkap untuk menjadi bangsa yang besar yang maju dan sejahtera, modal dasar itu adalah

Pertama, Jumlah Penduduk 272 juta jiwa ( terbesar ke empat di dunia) dengan kualitas dasar sebenarnya bagus berarti merupakan human capital dan potensi pasar domestic yang sangat besar.

Kedua, Kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam, baik yang terdapat di darat maupun di laut.

Ketiga, Posisi geoekonomi yang sangat strategis, dimana 45 % dari total barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1500 triliun dollar AS setiap tahunnya dikapalkan melalui wilayah laut Indonesia (UNCTAD, 2010).

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal, mulai dari kelembagaan politik yang menyuburkan budaya instant, premanisme, politik uang, dan korupsi, rendahnya etos kerja bangsa, sampai lemahnya penguasaan dan penerapan IPTEK( Ilmu pengetahuan dan Teknologi) dalam berbagai kehidupan bangsa ini.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera bangkit dan bersatu padu untuk secara cerdas dan ihlas mengatasi segenap permasalahan dan secara simultan mendayagunakan semua potensi bangsa menuju satu tujuan, yakni terwujudnya Indonesia yang maju, adil makmur dan berdaulat. Selama 8 tahun terakhir, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia dihasilkan oleh sektor jasa keuangan dan sektor riil non-tradeable, seperti perhotelan, apartemen, mall, dunia hiburan dan jasa transportasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa kedua sekto ekonomi ini pada umumnya berlangsung diwilayah perkotaan, dan hanya menyerap tenaga kerja sekitar 40.000 samapi 150.000 orang tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu lebih dari 70 persen pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi (belanja) pemerintah, swasta dan masyarakat. Bukan dari investasi sektor riil tradeable yang produktif dan ekspor dengan kandungan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi.

Oleh Karen itu agenda pembangunan ekonomi yang mestinya kita kembangkan adalah sektor-sektor(kegiatan) ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan (income) yang dapat menyejahterakan pelaku usaha dan seluruh rakyat secara berkeadilan dan berkesinambungan, sehingga setiap warga Negara minimal dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mengingat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu Negara penghutang terbesar di dunia ( 415,0 miliar dolar AS, Bisnis .com Juli 2021)

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.B.Susanto,Dkk.2002, Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana membangun kesejahteraan daerah,PT Gelora Aksara Pratama,Erlangga Jakarta.
- Ardani, Amiruddin,1996 Regional development in Indonesia Issued and challenges Discussion paper no 36 Nagoya Universitu Nagoya,
- Arsyad,1994. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah,Yogjakarta BPF
- Fitch Ratings Inc,2013. Fitch ratings Sovereign 2012 transition and devault study New York,USA.17p
- Iskandar,2001. Penyusunan perencanaan partisipatori, makalah pada Seminar kuliah perencanaan Ekonomi Tata ruang Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lincoln Arsyad,2010 Masalah distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia, Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Jogjakarta.
- Majid N,1997 Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar daerah. Prisma LP3ES (3) 3-16
- Mc.Kinsley Global Institute, 2012 The Archipelago economy Unleashing Indonesia Potential, 106P.
- Puji Hadiyanti 2006, Kemiskinan dan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Journal, Pengembangan masyarakat Islam , Vol 2 No 1 Juni 2006
- Sulyanto,O.2005.Disparitas Tingkat kehidupan masyarakat antar wilayah Jawa Barat dan strategi Penanggulanga nya Institute Pertanian Bogor.
- Sukirno,S,2018 Ekonomi Pembangunan Jakarta LPFE Universitas Indonesia.
- Todaro, Michael.1994, Economic Development, Edisi ke 5 Essex Longnam,bab v
- United,A Nations Development Programme UNDP, 2011.Human Development Relft 2011 Sustainability and Equity A Better Future For All New York,USA,185p.